

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun pertumbuhan ekonomi sektoral. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada, yang pada akhirnya dapat mencapai kemakmuran suatu bangsa dan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode keperiode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, ini merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat

pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu: meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan social dalam kehidupannya (Todaro, 2011).

Keberhasilan perkembangan ekonomi selalu dikaitkan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak *multiplier* yang besar terhadap banyak aspek ekonomi dan sosial masyarakat, terutama terhadap beberapa permasalahan sosial misalnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, inflasi, pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan terjadi proses transformasi yang bersifat struktural dalam perekonomian dan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu menjadi salah satu hal yang ingin dicapai oleh semua negara maupun daerah. Sedangkan beberapa pakar ekonomi pembangunan mengatakan jika pertumbuhan ekonomi adalah merupakan suatu istilah bagi negara yang telah maju untuk menyebutkan keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk negara yang sedang berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara ataupun daerah. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, maka secara langsung akan berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk yang tergolong miskin. Oleh

karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan dilakukan secara berkesinambungan. Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat memberikan gambaran mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera selama periode tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 3,40 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera lebih kecil dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 3,64 persen. Selanjutnya wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Indonesia adalah Provinsi Sumatera Selatan (4,44%), Bengkulu (4,04%), Sumatera Utara (4,01%), Lampung dan Sumatera Barat (3,84%) serta Jambi (3,55%) Hal ini disebabkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Indonesia dalam mengalami penurunan.

Berdasarkan Bakan (2017), Handayani (2016) dan Anshori (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh angka kesempatan kerja, angka harapan hidup dan tingkat pendidikan. Sedangkan penurunan ini disebabkan akibat dampak negatif perekonomian global yang menyebabkan pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan dapat menimbulkan suku bunga nasional yang tinggi,

sehingga menambah tekanan terhadap bank, perusahaan lokal dan rumah tangga untuk menyelesaikan utang, sekaligus menghambat kemampuan untuk berinvestasi atau belanja.

Tenaga kerja merupakan sumberdaya manusia “poros” dari roda pembangunan dan perekonomian. Tenaga kerja yang memperoleh pekerjaan dan berkerja secara produktif akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan penggunaan tenaga kerja dibutuhkan dalam pemanfaatan maksimal dari tenaga kerja sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan permintaan dan penawaran tenaga kerja menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja dipengaruhi berbagai faktor diantaranya pendidikan, angkatan kerja, upah, tenaga kerja, sosial-ekonomi, maupun komposisi industri. Pendidikan sebagai faktor dalam permintaan pasar tenaga kerja secara tidak langsung menuntut tenaga kerja untuk mengentaskan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk memenuhi persyaratan dalam permintaan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah angkatan kerja berusia dewasa yang mendapatkan pekerjaan dan sedang bekerja. Mendapatkan pekerjaan berarti akan bekerja dan menghasilkan output. Output dan tenaga kerja memiliki hubungan erat. Meningkatnya tenaga kerja berarti meningkatnya output per orang yang dipekerjakan biasa disebut produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi kontribusi utama dalam naiknya pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi naik maka jumlah tenaga kerja terserap juga akan naik. Tenaga kerja yang belum mampu

memenuhi angkatan kerja berdampak pada penambahan pengangguran. Pengangguran inilah yang mengurangi kontribusi pertumbuhan ekonomi.

IPM ini mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya, yaitu

investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2011).

Berdasarkan data yang yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2022) bahwa rata-rata tingkat TPAK di Pulau Sumatera selama tahun 2016-2021 mengalami peningkatan rata-rata menjadi sebesar 66,33 persen. Angka tersebut dibawah angka TPAK Indonesia yaitu menjadi sebesar 69,06 persen. Untuk wilayah yang memiliki TPAK yang lebih besar dari TPAK Pulau Sumatera dan Indonesia adalah Provinsi Sumatera Selatan (70,33%), Provinsi Lampung (70,27%), dan Provinsi Aceh (69,61%). Seharusnya perkembangan TPAK tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera secara langsung atau tidak langsung.

Sama halnya angka harapan hidup di Provinsi Sumatera pada periode yang sama mengalami peningkatan menjadi sebesar 70,26 persen. Angka tersebut dibawah angka Angka harapan hidup Indonesia yaitu sebesar 71,57 tahun. Untuk wilayah yang memiliki Angka harapan hidup yang lebih besar dari Angka harapan hidup Pulau Sumatera dan Indonesia adalah Provinsi Riau (75,25 tahun). Peningkatan angka harapan hidup ini seharusnya memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Begitu juga dengan tingkat pendidikan di Provinsi Pulau Sumatera mengalami peningkatan sebesar 8,62 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat pendidikan di Indonesia yaitu sebesar 8,48 tahun. Untuk wilayah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih besar dari tingkat pendidikan Pulau Sumatera dan Indonesia adalah Provinsi Kepulauan Riau (9,88 tahun), Provinsi Aceh (9,09 tahun), Provinsi Sumatera Utara (8,91 tahun). Peningkatan angka ini juga akan berkontribusi terhadap perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka harapan hidup dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Pulau Sumatera maka secara khusus akan melakukan penelitian berjudul **Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Angka harapan hidup dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka harapan hidup dan tingkat pendidikan di Pulau Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka harapan hidup dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka harapan hidup dan tingkat pendidikan di Pulau Sumatera.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka harapan hidup dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.

1.4. Manfaat penelitian

Dari penelitian tersebut, diharapkan dapat diperoleh manfaat yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi. Manfaat tersebut dapat berguna untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan dan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pengembangan penelitiannya. Adapun manfaat penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan guna membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka implementasi menuju tindakan praktisi dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Akademis

Dapat bermanfaat bagi instansi terkait dalam hal ini bagi pemerintahan daerah. Memberikan informasi bagi para pengambil kebijakan khususnya pemerintahan pada masing-masing provinsi di Pulau Sumatera dalam upaya

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), angka harapan hidup dan tingkat pendidikan menjadi meningkat dan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi.